



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI WAHYUNI GANEFIANTI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 475016

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.395.000.000

1. Tanah Seluas 1630 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 412 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 649 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 290.000.000

1. MOBIL, YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA CSS12AIRR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 122.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.892.750.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.892.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.